



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR KP 563 TAHUN 2016**

**TENTANG
PENERIMA PENGHARGAAN UNIT KERJA DENGAN KINERJA TERBAIK
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2016**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan akuntabilitas kinerja unit kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan, perlu diberikan penghargaan kepada unit kerja yang telah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, menerapkan pemerintahan yang baik dan mengutamakan prinsip efektif, efisien, ekonomis dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang penerima Penghargaan Unit Kerja dengan Kinerja Terbaik di Lingkungan Kementerian Perhubungan Tahun 2016.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 86 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1012);
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813);

8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 91 Tahun 2015 tentang Tata Cara Tetap Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 737);
9. Instruksi Menteri Perhubungan Nomor IM.2 Tahun 2010 tentang Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Lingkungan Kementerian Perhubungan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENERIMA PENGHARGAAN UNIT KERJA DENGAN KINERJA TERBAIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2016.

Pertama : Menetapkan nama-nama Penerima Penghargaan Unit Kerja Dengan Kinerja Terbaik di Lingkungan Kementerian Perhubungan Tahun 2016 yang terdiri dari Unit Kerja eselon II, eselon III dan eselon IV sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Kedua : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di JAKARTA
Pada tanggal 16 September 2016

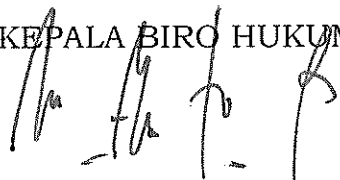
MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



SRI LESTARI RAHAYU

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19620620 198903 2 001

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : KP 563 TAHUN 2016

TANGGAL : 16 September 2016

PENERIMA PIALA DAN PIAGAM PENGHARGAAN UNIT KERJA DENGAN
KINERJA TERBAIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
TAHUN 2016

NO	KATEGORI	ESELON II	ESELON III	ESELON IV
1.	TERBAIK I (PERTAMA)	BP3IP Jakarta	Politeknik Pelayaran Surabaya	UPBU Kelas III Melonguane
2.	TERBAIK II (KEDUA)	Kantor Otoritas Bandara Wilayah IV Bali	UPBU Kelas I Mutiara Sis Al Jufri	UPP Bade Papua
3.	TERBAIK III (KETIGA)	Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar	Distrik Navigasi Benoa Bali	UPBU Kelas III Nunukan

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



SRI LESTARI RAHAYU

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19620620 198903 2 001